



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 15009-15024

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Koperasi Republik Indonesia di Kabupaten Bengkalis

Susilawati¹, Sri Rahmany², Ade Suhartini³, Ahmad Shirotol⁴, Ridwan Rifa'l Salim⁵

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Email : susilawatirasip92@gmail.com

Abstrak

Good Corporate Governance menjadi unsur yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam setiap lini manajemen suatu perusahaan. Perusahaan yang besar dan canggih teknologi tanpa adanya sistem *Good Corporate Governance*, tidak akan membuat perusahaan tersebut bertahan lama dalam menjalankan bisnis. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan informasi faktual yang diperoleh dari Koperasi RI Kabupaten Bengkalis. Teknik pengumpulan data berupa Observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan agar menghasilkan data yang lebih mendalam dan objektif, dengan melakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam pemilihan informan menggunakan kesimpulan akhir melalui pelaksanaan input, pelaksanaan proses, dan pelaksanaan output. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variable-variabel yang ada. Data yang dianalisa di dalam penelitian berupa data good corporate governance terhadap pelayanan dan transparansi serta analisisnya dengan dampak internal eksternal serta dari unsur syariah Kesimpulan dari Dengan demikian, untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan atau organisasi apapun harus mampu merancang sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat menekankan aspek pengendalian atas reabilitas pelaporan keuangan guna memenuhi tanggung jawab suatu laporan keuangan, serta efisiensi dan efektifitas operasional dalam pemakaian sumberdaya yang dimiliki oleh Koperasi RI Kabupaten Bengkalis itu sendiri untuk menghasilkan informasi keuangan dan non keuangan dalam rangka pengambilan keputusan, dan ketaatan pada hukum dan peraturan. Dengan penerapan dari Prinsip GCG pada Koperasi RI Kabupaten Bengkalis yang berlaku adalah: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (profesionalisme) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Walaupun ada beberapa

permasalahan yang terjadi seperti kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari Ketua dan Anggota Koperasi RI Kabupaten Bengkalis, rendahnya tingkat pemahaman dari Pengurus Koperasi tentang prinsip-prinsip good corporate governance, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh Pengurus Koperasi, belum adanya budaya yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip good corporate governance, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal. Kendala eksternal dalam pelaksanaan corporate governance terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum (*law-enforcement*). Indonesia tidak kekurangan produk hukum.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance (GCG), Koperasi RI Kab Bengkalis, Syariah, Sistem, transparency, akuntability, responsibility, independensi*

Abstract

Good Corporate Governance is a very important element in every line of management in a company. A large and sophisticated company with technology without a Good Corporate Governance system will not make the company last long in its glory. In this study, the authors used a qualitative descriptive method, namely by presenting factual information obtained from the RI Cooperative in Bengkalis Regency. Data collection techniques in the form of observation, interviews, documentation and literature studies in order to produce more in-depth and objective data, by conducting structured and unstructured interviews. In the selection of informants using the final conclusion through the implementation of the input, implementation of the process, and implementation of the output. In handling the data, the writer uses descriptive research, which aims to describe what is currently happening. It includes efforts to describe, record, analyze and interpret conditions that are currently occurring or existing. In other words, descriptive research aims to obtain information about the current situation and see the relationship between existing variables. The data analyzed in this study are in the form of good corporate governance data on service and transparency as well as analysis with internal external impacts as well as from sharia elements. emphasizing aspects of control over the reliability of financial reporting in order to fulfill the responsibilities of a financial report, as well as operational efficiency and effectiveness in the use of resources owned by the RI Cooperative in Bengkalis Regency itself to produce financial and non-financial information in the framework of decision making, and compliance with laws and regulations . With the application of the GCG Principles to the Republic of Indonesia Cooperative in Bengkalis Regency, what applies are: transparency, accountability, responsibility, independence (professionalism) as well as fairness and equality. Although there were several problems that occurred such as internal constraints including the lack of commitment from the Chairperson and Members of the Indonesian Cooperative in Bengkalis Regency, the low level of understanding of the Cooperative Management regarding the principles of good corporate governance, the lack of role models or role models given by the Cooperative Management, the absence of a culture that supports the realization of the principles of good corporate governance, and the ineffectiveness of the internal control system. External constraints in the implementation of corporate governance related

to legal instruments, rules and law enforcement (law-enforcement). Indonesia has no shortage of legal products.

Keywords: *Good Corporate Governance, transparency, akuntability, responsibility, independensi.*

PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) atau sering dikenal dengan istilah tata kelola perusahaan yang baik telah menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak tahun 1997. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi tempuruk. Semenjak itulah, semua pihak sepakat untuk dapat bangkit dari ketempurukan, Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Berbagai upaya memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip GCG di semua lini masyarakat.

Good Corporate Governance di Indonesia telah dikenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *economy recovery* pasca krisis. Perhatian dunia terhadap *Good Corporate Governance* mulai meningkat tajam di Negara - Negara Asia sejak jatuhnya perusahaan - perusahaan raksasa terkemuka di dunia, termasuk *Enron Corporation* dan *Worldcom* di Amerika Serikat, *HH Insurance Company Ltd* dan *One-Tell Pty Ltd* di Australia serta *Parmalat* di Italia pada awal dekade 2000-an.

Pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada setiap lini manajemen dalam suatu perusahaan sangat diperlukan. Dalam beberapa literatur, GCG disebutkan sebagai *Corporate Governance*.

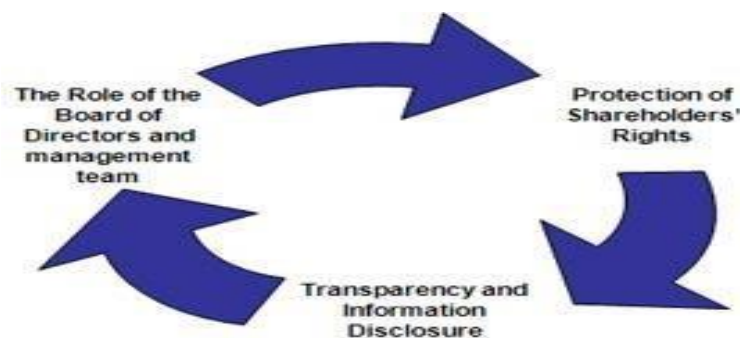
Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan oleh semua entitas bisnis. Hal ini sangat penting karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam suatu perusahaan. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip good corporate governance akan berdampak pada terjadinya manipulasi informasi oleh perusahaan. Perusahaan atau entitas bisnis wajib menerapkan praktik good corporate governance. Hal ini diperkuat dengan terbitnya pedoman umum good corporate governance oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang mewajibkan setiap organisasi untuk menerapkan praktik *good corporate governance*.

Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat

waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Prinsip GCG yang disusun oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menjadi salah satu acuan universal yang menjadi pijakan dalam pengembangan di banyak negara. *OECD* merupakan organisasi pembangunan ekonomi yang beranggotakan negara-negara maju yang terdiri dari Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Jepang, Jerman, Finlandia, Prancis, Yunani, Irlandia, Italia, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris dan Amerika Serikat. Jika digambarkan dalam skema, adalah sebagaimana berikut :

Gambar Skema GCG secara Pembangunan Ekonomi 1



Peraturan dan dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan seyogyanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.

Lima prinsip dasar GCG di Indonesia lebih terkenal dengan istilah TARIF, yang terdiri atas: transparansi, akuntabilitas, responsabilitas, independensi dan fairness (kewajaran). Peran penting GCG dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negera (BUMN).

Dunia Lembaga Keuangan di Indonesia dalam satu dasawarsa ini memang dibidang begitu sangat berkembang dan menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah.

Koperasi merupakan salah satu entitas bisnis yang bergerak di bidang ekonomi yang selama ini dalam kegiatannya selalu berlandaskan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, karena dalam pengaplikasian kegiatan selalu berusaha mengedepankan kepentingan

anggotanya berdasarkan kesejahteraan bersama. Koperasi telah ditetapkan sebagai badan usaha berdasarkan UU no 25 tahun 1992. Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari beberapa kumpulan anggota perseorangan yang membentuk suatu kelompok dalam rangka mengadakan kegiatan ekonomi yang menyediakan jasa yang bersifat simpan pinjam pada awal pembentukannya. Dimana, dalam suatu kelompok diadakan kegiatan pengumpulan modal yang berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Namun, pada realitanya dalam pengaplikasian kegiatan ekonomi organisasi koperasi, terdapat kendala yang harus dihadapi, yakni tidak semua anggota koperasi dapat melakukan pengolahan modal yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada para anggota dalam bentuk pinjaman dan sisa hasil usaha (SHU). Dengan adanya hal itu, maka diperlukan adanya peran pengurus koperasi yang berkompeten, teliti dan loyal untuk menangani secara khusus dalam membantu anggota mengelola dan mengembangkan koperasi.

Koperasi adalah lembaga ekonomi kerakyatan yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan sosial masyarakat. Karena itu, pertumbuhan koperasi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan bisnisnya dari waktu ke waktu agar menjadi bagian substantif dan integralistik dalam perkenomian nasional. Agar tetap bangkit, dalam tataran operasional koperasi dituntut untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tingkat operasi yang efektif. Untuk menjalankan kedua fungsi tersebut dibutuhkan berbagai teori yang kuat, dan manajemen serta organisasi yang tangguh.

Koperasi Republik Indonesia merupakan salah satu koperasi yang independen berdiri sendiri dengan modal dari anggota. Koperasi Republik Indonesia (RI) ini mempunyai 2 unit usaha, diantaranya Simpan Pinjam dan Wisma Melati. Akan tetapi pengelolaan dalam kedua unit tersebut dikelola oleh orang yang sama. Sehingga ada beberapa permasalahan yang timbul melalui pengelolaan kedua unit tersebut. Dimana di Koperasi RI tidak ada SOP dalam membuat kebijakan dalam penggunaan dan pengelolaan kemampuan menjalankan usahanya.

Sehingga kedua unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi Republik Indonesia Kabupaten Bengkalis tidak memberikan dampak peningkatan dari unit usaha yang dijalankan. Akan tetapi walaupun pihak koperasi tidak mempunyai standar operasional yang baku dalam pengelolaannya namun pihak koperasi memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan budaya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku baik dari regulator, prinsip syariah dan ketentuan internal yang berlaku.

Kemudian dari sinilah ada suatu hal yang lebih penting dalam pengelolaan sebuah Koperasi yang baik, yaitu pentingnya akan adanya strategi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dari peningkatan operasional Koperasi Republik Indonesia itu sendiri. Namun tidak jauh beda dari beberapa permasalahan yang pernah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu,

seperti yang terjadi proses manajerial dan pengelolaan koperasi yang masih minim dan sulit seperti yang terjadi pada koperasi dikota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variable-variabel yang ada. Data yang dianalisa di dalam penelitian berupa data *good corporate governance* terhadap pelayanan dan transparansi serta analisisnya dengan dampak internal eksternal serta dari unsur syariah.

Analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, setelah meneliti di lapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasi dengan berbagai cara, seleksi, ringkasan, penggolongan, dan bahkan ke dalam angka-angka.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan alur kedua dalam kegiatan analisis data. Data dan informasi yang sudah diperoleh di lapangan dimasukkan ke dalam suatu matriks. Penyajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, grafik, dan bagan.

3. Verifikasi Data

Begitu matriks terisi, maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Sekumpulan informasi yang tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif, prinsip pokok teknik analisisnya ialah mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap pelayanan dan transparansi yang dilaksanakan di Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Dalam sistem pelaksanaan program input ini peneliti menggunakan indikator ketersediaan (*indicator of availability*) yaitu dengan melihat apakah unsur yang seharusnya ada dalam suatu proses itu benar - benar ada. Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dibahas pada bab 3 sebelumnya yaitu evaluasi *good corporate governance* (gcg) dalam pelayanan jasa pada Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Bahwa temuan hasil sistem pelaksanaan pelayanan dan transparansi yang dilaksanakan memfokuskan terhadap aktifitas yang melibatkan langsung konsep pelaksanaan program GCG pada Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Konsep pelaksanaan program GCG itu sendiri adalah dijadikannya gcg sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan merupakan landasan pelaksanaan tugas seluruh unit organisasi dalam rangka memberikan nilai tambah (*value added*) terhadap ekonomi bagi para investor yang ada di dalam pengembangan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku serta nilai - nilai etika yang berlaku secara umum pada industri Unit Usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Adapun sistem pelaksanaan program GCG pada Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis berdasarkan Kebijakan dan Hasil Rapat Pelaksanaan Kegiatan Unit Usaha Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan program *Good Corporate Governance* bagi Unit Usaha Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah mengamanahkan untuk melaksanakan suatu tata kelola Wisma yang menerapkan 5 bentuk prinsip dasar GCG Hal tersebut diterapkan antara lain dengan :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pimpinan dari Wisma Kabupaten Bengkalis
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pengawas Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Pelaksanaan dan tugas Internal dan Eksternal
5. Pelaksanaan prinsip yang sesuai norma dalam kegiatan penghimpunan dana
6. Penanganan benturan kepentingan

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Berdasarkan uraian keterangan pelaksanaan program *good corporate governance* di atas, terlihat bahwa keberadaan pelaksan koperasi, Pengawas dan Unit Usaha memiliki peranan penting dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan fungsinya masing - masing yang diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang undangan (*fiduciary responsibility*), dalam hal ini peranan Bank Indonesia untuk memelihara kesinambungan perusahaan dalam jangka panjang. Dan memiliki persamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai - nilai perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik dimana Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis menetapkan prinsip-prinsip yang mendasari dari mekanisme pengelolaan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika pengelolaan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Dalam pelaksanaan penerapan GCG di Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis dengan melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi serta kondisi dari lingkungan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan mempertingkatkan kesiapan, sehingga penerapan GCG dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam pengelolaan.ada beberapa tahap dalam pelaksanaan GCG pada Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis :

a) *awareness building*,

Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

b) GCG assessment, dan

GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa

yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

c) *GCG manual building*.

GCG manual building, adalah langkah berikut setelah GCG assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai pendukung pencapaian tujuan dan sasaran Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis harus diimbangi dengan keefektifan dan efisiensi pengelolaannya. Maka dari itu, audit TI seharusnya dilakukan untuk menjaga keamanan sistem informasi sebagai asset organisasi, untuk mempertahankan integritas informasi yang disimpan dan diolah dan tentu saja untuk meningkatkan keefektifan penggunaan teknologi informasi serta mendukung efisiensi dalam organisasi.

Aplikasi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis :

- a. **Transparansi** Sebuah badan usaha/perusahaan harus mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun *stakeholder* mengenai perusahaan tersebut. Apabila informasi itu tersedia secara tepat, memadai, akurat, dan jelas dengan baik akan membawa citra perusahaan itu menjadi baik begitupun sebaliknya. Tidak hanya itu informasi yang disediakan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat, apalagi Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis adalah sebuah badan usaha yang tujuannya untuk membantu masyarakat desa khususnya. Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis berjalan selama 11 (sebelas) tahun menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya seperti unit usaha yang dijalannya. Pada dasarnya masyarakat di desa biasanya memang kurang begitu memperhatikan maka dari itu informasi tersebut disediakan agar mudah untuk dipahami masyarakat. Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah menyediakan informasi baik secara jelas, akurat, sesuai, dan memadai mengenai Produktifitas Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis itu sendiri baik dalam bentuk digital maupun dokumen. Informasi ini disediakan dalam bentuk digital sendiri melalui website Desa Bantan Tua bantantua.desa.id?web/statis/profil-ued-sp dan juga grup Whatsapp dari pada pengurus Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten

Bengkalis Kabupaten Bengkalis itu sendiri. Kemudian untuk penyediaan informasi dalam bentuk fisik yaitu dokumen dapat berupa profil Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sedangkan dulu informasi juga disediakan melalui musyawarah koperasi. Dikarenakan saat ini teknologi semakin canggih maka pengumuman disebar melalui platform digital. Bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali hasil temuan dilapangan mengenai ketersediaan informasi mengenai Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Maka dari itu penyediaan informasi mengenai Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis melalui media online yaitu website atau sosialisasi namun tidak terperinci dalam pemberian informasi. Ketersediaan informasi mengenai Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis lebih jelas, akurat, memadai, dan sesuai hanya melalui observasi dari pihak yang melaksanakan transaksi di Koperasi tersebut. Tidak hanya mengenai ketersediaan informasi, dalam konsep transparansi organisasi harus terbuka mengenai kondisi keuangan mengenai kondisi organisasi. Begitu halnya dengan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis telah membuat laporan keuangan secara berkala yang kemudian dilaporkan kepada pengawas. Pembuatan laporan keuangan yang dibuat oleh Bendahara Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis yang dilaporkan pada setiap bulannya kepada desa meskipun dalam bentuk sederhana. Dengan adanya laporan keuangan tersebut dari pihak koperasi dapat mengetahui perkembangan dari kinerja Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis. Tersedianya informasi mengenai kondisi keuangan dalam bentuk fisik sehingga dapat dilihat langsung di Koperasi ataupun Bendahara Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis.

- b. Akuntabilitas Organisasi / perusahaan agar mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya masing-masing dalam hal ini melaksanakan tugas, fungsi yang sesuai secara transparan dan wajar. Pertama, struktur organisasi. Dalam pelaksanaannya Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis diperlukan pertanggungjawaban dari masing-masing posisi guna menjalankan tugas, fungsi, dan kegiatan agar berkembang dan berjalan dengan baik. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa administrasi, pengelolaan unit usaha, dan laporan secara berkala. Dalam keberjalanan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis mempunyai pengurus yang memiliki tugas dan wewenang. Dengan adanya struktur organisasi yang telah dibentuk sudah memiliki tanggungjawab yang harus dipertanggungjawabkan dalam mengelola Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis dari masing-masing pengurus. Terdapat rincian tugas dan wewenang dari pengurus Koperasi Republik Indonesia (RI)

Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Koperasi tahun 2004 Badan Hukum No. 183/PAD/BH/DISKOP/IV/2004 Tentang Pembentukan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis. Pengurus Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis sudah memiliki tanggungjawab masing-masing sesuai dengan posisi jabatan mereka. Mereka mempertanggungjawabkan kinerja mereka seperti membuat laporan, melakukan pertemuan, dan koordinasi. Hal ini hal yang sangat penting karena sumber daya manusia menjadi faktor utama keberhasilan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis. Sumber daya manusia sangat menjadi faktor penentu untuk bergerak maju atau berhenti ditempat Kedua, profesionalitas. Dalam menjalankan sebuah perusahaan, memiliki sikap profesional sangatlah penting agar tercapai tujuan yang telah disepakati bersama. Untuk menjadi profesional berarti mereka harus mampu menempatkan diri, harus paham, harus mengerti akan tugas dan tanggungjawab dalam bekerja. Fokus dan konsisten akan target dan tujuan juga sangat penting jika ingin menjadi orang yang profesional. Dalam menjalankan sebuah perusahaan, mereka sudah memiliki kriteria agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, begitupun dengan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis. Mempunyai kompetensi baik dari segi intelektual dan perilaku sangat dibutuhkan dalam mengelola Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis. Para pengelola Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing posisi jabatan mereka. Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa dari pengurus Koperasi sendiri sudah bekerja lama dalam pengelolaan kegiatan koperasi RI yang ada 2 unit usaha diantaranya unit usaha simpan pinjam dan unit usaha wisma melati. Pengamalan kerja yang dimiliki mengenai mengelola koperasi terutama dalam meningkatkan keuntungan sangat bermanfaat hingga saat ini berjalan. Keempat, Tujuan dari pemberian reward ini adalah untuk memotivasi agar bekerja secara efektif dan efisien terutama di 2 unit usaha yang dilakukan oleh koperasi RI. Dan juga dari pemberian reward ini sebagai upaya membalas jasa dari perusahaan kepada karyawan. Sedangkan *punishment* sendiri merupakan suatu sanksi yang diberikan kepada karyawan apabila melakukan kesalahan. *Punishment* ini diberikan agar menjadi jera sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Pada Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis memang tidak menerapkan reward dan punishment. Para pengurus ini mengelola Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis atas dasar sukarela dan memang ingin melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.

- c. Responsibilitas Pertama, kepatuhan terhadap hukum. Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis sendiri telah memiliki peraturan dan anggaran dasar yang sampai

saat ini menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan. Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis hingga saat ini belum terjadi pelanggaran. Pada dasarnya prinsip ini dapat terwujud apabila terwujudnya kesadaran akan tanggungjawab dari tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh para pengurus Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis. Rasa memiliki tanggungjawab tersebut itulah yang mengarahkan agar tidak terjadi sebuah pelanggaran karena menjunjung tinggi etika dalam bisnis. Kedua, tanggungjawab kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang menghasilkan kepuasan masyarakat. Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis telah memberikan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat. Seperti halnya pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan sendiri juga cukup baik, masyarakat dapat langsung menghubungi pengelola Koperasi. Sehingga disesuaikan dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Terutama dari segi unit simpan pinjam yang dapat membantu masyarakat sekitarnya.

- d. Independen Suatu perusahaan harus mampu menghindari dominasi yang dilakukan oleh pihak luar ataupun dari pihak dalam. Bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran masing-masing sebagai bentuk tanggungjawab sebagai pengelola. Hal ini akan membawa hal yang positif kepada Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis itu sendiri apabila diterapkan dengan baik. Prinsip independensi ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis dari pihak luar maupun dalam. Sehingga saat ini Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis telah mampu bertahan agar tidak terdominasi pihak luar ataupun dalam. Dari pihak dalam atau dari organ pada Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis, mereka tidak melakukan tindakan yang mendominasi sendiri. Koperasi tersebut bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- e. Kewajaran Perlakuan yang wajar dari Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis kepada seluruh pihak yang terlibat. Tidak hanya perlakuan tetapi memberi kesempatan kepada seluruh pihak yang terlibat secara adil dan wajar. Pemberian perlakuan dan kesempatan yang sama secara adil dan wajar ini diharapkan mampu membawa Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis menjadi lebih baik lagi. Perlu diketahui penerapan prinsip kewajaran ini dapat menghasilkan citra positif kepada Koperasi RI Kabupaten Bengkalis. Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis telah memberikan perlakuan yang wajar dan adil, tidak ada tindakan diskriminasi kepada para pengelola. Perlakuan yang wajar dan adil ini diberikan kepada pengelola Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis dengan harapan para pengelola dapat

bekerja sesuai dengan tanggungjawab dapat membawa Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Dari pihak koperasi tidak melakukan tindakan diskriminasi ras, suku, agama, dan sebagainya kepada para pengelola ataupun masyarakat. Pihak Koperasi memberikan kesempatan yang sama kepada para pengelola unit usaha.

Komponen *Good Corporate* yang diterapkan oleh Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis juga mempunyai dasar dalam pengendalian internal yang dapat dikategorikan menjadi tiga (3) kategori dasar yaitu: 1) lingkungan pengendalian yang berkaitan dengan tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur dan pemilik perusahaan terhadap pengendalian, 2) sistem akuntansi yang bertujuan untuk mengontrol seluruh transaksi yang dicatat, diproses dan dilaporkan telah memenuhi ke enam tujuan audit umum atas transaksi tersebut, 3) prosedur pengendalian yaitu aktivitas pengendalian ini berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkesinambungan oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada dalam perusahaan. Ini menunjukkan bahwa, pimpinan harus mampu merencanakan, dan mengevaluasi secara konsisten dan kontinyu, sehingga pengendalian berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Apabila suatu pengendalian internal tidak dilakukan sesuai dengan sistem pengendalian yang diinginkan, maka proses pengendalian tidak berarti terhadap pencegahan *fraud*.

B. Penerapan *Good Corporate Governance* jika di tinjau dari Perspektif Syariah di Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis

Dengan meningkatnya persaingan yang ketat untuk memperoleh modal, kecenderungan saat ini, lebih banyak di titik beratkan pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang sungguh-sungguh menjadi sangat vital bagi dunia usaha terutama dalam peningaktan ekonomi pedesaan yang dikembangkan melalui lembaga Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis.

Pelaksanaan *Islamic Governance* secara utuh juga merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri.

Mekanisme ini dipengaruhi oleh faktor eksternal Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis yang meliputi kreditor dan lembaga yang mengesahkan legalitas. Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis secara lebih efisien dan efektif. Mengurangi potensi benturan kepentingan organ

dalam Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis itu sendiri dan pekerja dalam menjalankan bisnis. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis itu sendiri.

Tata Kelola Perusahaan yang baik akan mengarahkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, sehingga memastikan pengelolaan lingkungan kerja yang positif dan kondusif, bertanggung jawab kepada pasar dan komunitas serta mencapai kinerja keuangan yang sehat dan berkesinambungan, dan ini merupakan dasar Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis melaksanakan pengelolaan dalam kegiatan usahanya.

Birokrasi yang bekerja secara efisien, efektif dan produktif sehingga mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat. Birokrasi yang bekerja transparan (terbuka), namun tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Meningkatnya kinerja Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional Perseroan serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

Konsep GCG pada dasarnya adalah *internal balance* dan *external balance*. Internal balance meliputi keseimbangan antar organ sub bagian dari pekerjaan, dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional. Sedangkan, *external balance* meliputi pemenuhan tanggung jawab Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan *stakeholder*. Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis dituntut untuk memberikan nilai lebih baik secara finansial bagi pemegang saham maupun kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui implementasi GCG yang matang.

Melalui implementasi GCG, Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis mendapatkan manfaat yang cukup besar untuk meraih berbagai manfaat termasuk kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis.

Perusahaan yang telah menerapkan GCG, akan lebih dipercaya kreditor maupun masyarakat umum sehingga pelaksanaan kegiatan yang lebih likuid bisa semakin meningkat. Prinsip-prinsip GCG perlu diterapkan dalam perusahaan untuk mengatasi masalah yang ada dalam mengelola perusahaan. Prinsip-prinsip pokok GCG yang harus diterapkan adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Implementasi prinsip-prinsip GCG terhadap pelayanan dan transparansi mencerminkan perusahaan telah dikelola dengan baik dan transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholder*. Kehadiran GCG merupakan salah satu solusi untuk menciptakan kegiatan bisnis yang kondusif dan menghindari terjadinya skandal di dalam perusahaan.

GCG merupakan suatu keharusan bagi lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang, harus dibudayakan dan dilakukan dalam struktur bisnis saat ini. Akan sulit untuk mempertahankan prinsip-prinsip GCG jika hanya mengandalkan peraturan, karena yang lebih penting adalah memelihara budaya etika yang kuat, dan kejujuran.

Penerapan GCG pada Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis sekarang ini sudah sesuai dengan yang dianjurkan dalam agama Islam, terutama ditinjau dari segi hukum atau peraturan yang dijalankan oleh Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis itu sendiri, akan tetapi selama ini semua secara garis besar lembaga masih menggunakan dasar bunga dasar memberikan pinjaman kepada masyarakat. Akan tetapi prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam perspektif Islam sebenarnya ada dalam pengelolaan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis tersebut yang diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia dengan menyamakan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.

SIMPULAN

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan atau organisasi apapun harus mampu merancang sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat menekankan aspek pengendalian atas reabilitas pelaporan keuangan guna memenuhi tanggung jawab suatu laporan keuangan, serta efisiensi dan efektifitas operasional dalam pemakaian sumberdaya yang dimiliki oleh Koperasi RI Kabupaten Bengkalis itu sendiri untuk menghasilkan informasi keuangan dan non keuangan dalam rangka pengambilan keputusan, dan ketaatan pada hukum dan peraturan. Dengan penerapan dari Prinsip GCG pada Koperasi RI Kabupaten Bengkalis yang berlaku adalah: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (profesionalisme) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Walaupun ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari Ketua dan Anggota Koperasi RI Kabupaten Bengkalis, rendahnya tingkat pemahaman dari Pengurus Koperasi tentang prinsip-prinsip *good corporate governance*, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh Pengurus Koperasi, belum adanya budaya yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance*, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal. Kendala eksternal dalam pelaksanaan *corporate governance* terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum (*law-enforcement*). Indonesia tidak kekurangan produk hukum.

DAFTAR PUSTAKA

M. Wahyudin Zakarsyi, *Good Corporate Governance : Pada Badan Usaha Manufaktur*,

Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, (Bandung : Alfabeta, 2008),

Ridwan Khairandy & Camilia Malik, *Good Corporate Governance : Perkembangan Pemikiran, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total. 2007),

Siswanto Sutojo & E. John Alridge, *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*, (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2008),

Hindarmojo Hinuri, *The Essence of Good Corporate Governance; Konsep dan Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication, 2002),

Sumber: <http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/> *Our Principles*

Mas Achmad Daniri, *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*,(Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006),

"Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara" *artikel diakses pada situs : <http://www.trainingcenter.co.id/prinsip-prinsip-gcg>*

M. Wahyudin Zakarsyi, Ak, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung : Alfabeta, 2008),

Gusti Ayu Asri Pramesti, Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada Koperasi Di Kota Denpasar 2018, *Jurnal Riset Akuntansi*, Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)